

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah hak bagi semua orang untuk menaikkan derajatnya. Seperti yang telah disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang berisi, *setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*. Hal ini tidak terkecuali, termasuk Warga Negara Indonesia yang difabel. Hal ini ditegaskan pula oleh Pasal 5 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003, bahwa *warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, intelektual dan sosial, berhak memperoleh pendidikan khusus*.

Salah satu kendala utama bagi kelompok difabel adalah tidak terbukanya akses bagi mereka untuk bisa bekerja ataupun menuntut ilmu. Kondisi ini membuat kelompok difabel menjadi rentan dengan kemiskinan. Survey ICF Kemensos di 14 provinsi menunjukkan hampir 60% dari anak difabel usia sekolah tidak mengecap bangku sekolah.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemendikbud untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka adalah dengan membangun unit sekolah baru, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), dan mendorong tumbuhnya sekolah inklusi di daerah-daerah. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen), Hamid Muhammad mengatakan, “Biasanya kami menganggarkan setiap tahun membangun 25 sampai 30 unit sekolah baru untuk SLB.” Ujarnya di Gedung SLB Pembina Tingkat Nasional, Jakarta, Rabu (1/2/2017) (Maulipaksi, 2017).

Salah satu provinsi di Indonesia yang masih rendah akses pendidikannya bagi anak berkebutuhan khusus, adalah Jawa Tengah. Menurut data Persentase Penyandang Disabilitas Provinsi dari Data Susenas tahun 2012, Jawa Tengah menempati urutan keenam di Indonesia untuk kategori warga difabel terbanyak, dengan angka 3.9%. Mengapa demikian? Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini sulit mendapatkan pendampingan dan pembelajaran karena daya tampung sekolah luar biasa negeri di Jawa Tengah tidak mencukupi.

Karena tingkat cakupan dari SLB ini adalah tingkat Jawa Tengah, maka dasar dari pendekatan lokasi untuk SLB ini adalah dari kota/kabupaten yang paling membutuhkan kehadiran SLB, dengan indikator sebagai berikut:

- Memiliki urgensi yang tinggi
- Kota mudah diakses
- Ketersediaan lahan cukup
- Fungsi kota/kabupaten akan Pendidikan

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian data Sekolah Luar Biasa di Jawa Tengah berdasarkan data dari Dapodikdasmen.

Tabel 1.1 Rincian Data Sekolah

DATA SEKOLAH PROV. JAWA TENGAH - DAPODIKASMEN																			
NO	WILAYAH	TOTAL			SD			SMP			SMA			SMK			SLB		
		JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	N	S
1	Kab. Cilacap	1.348	1.086	262	1.032	975	57	201	84	117	42	18	24	67	7	60	6	2	4
2	Kab. Brebes	1.181	972	209	899	871	28	154	77	77	31	17	14	95	6	89	2	1	1
3	Kab. Banyumas	1.093	862	231	817	768	49	155	71	84	37	14	23	81	9	72	3	0	3
4	Kab. Grobogan	1.039	877	162	806	788	18	136	74	62	35	11	24	58	3	55	4	1	3
5	Kab. Kebumen	986	828	158	771	745	26	117	59	58	24	14	10	68	8	60	6	2	4
6	Kab. Klaten	974	772	202	758	680	78	119	65	54	28	15	13	55	12	43	14	0	14
7	Kab. Wonogiri	967	847	120	772	746	26	119	78	41	22	13	9	46	8	38	8	2	6
8	Kab. Pemalang	941	801	140	747	718	29	116	66	50	23	11	12	53	4	49	2	2	0
9	Kab. Tegal	908	743	165	701	675	26	113	49	64	27	11	16	65	7	58	2	1	1
10	Kota Semarang	880	401	479	509	327	182	188	45	143	76	16	60	89	12	77	18	1	17
11	Kab. Pati	848	721	127	680	647	33	92	59	33	25	8	17	47	6	41	4	1	3
12	Kab. Magelang	819	622	197	603	550	53	130	59	71	37	10	27	46	3	43	3	0	3
13	Kab. Blora	779	653	126	600	582	18	94	56	38	24	8	16	55	6	49	6	1	5
14	Kab. Boyolali	779	642	137	597	562	35	97	52	45	30	15	15	44	12	32	11	1	10
15	Kab. Kendal	773	623	150	575	551	24	108	50	58	34	14	20	50	7	43	6	1	5
16	Kab. Banjarnegara	769	710	59	630	617	13	98	75	23	13	8	5	25	8	17	3	2	1
17	Kab. Jepara	766	632	134	598	573	25	94	39	55	23	10	13	50	9	41	1	1	0
18	Kab. Sragen	759	613	146	579	542	37	92	49	43	24	10	14	57	11	46	7	1	6
19	Kab. Purworejo	680	561	119	519	499	20	92	43	49	23	11	12	43	7	36	3	1	2
20	Kab. Semarang	679	527	152	499	455	44	102	51	51	25	11	14	44	9	35	9	1	8
21	Kab. Demak	670	523	147	490	469	21	85	38	47	34	12	22	59	4	55	2	0	2
22	Kab. Pekalongan	648	553	95	511	474	37	85	63	22	18	11	7	33	4	29	1	1	0
23	Kab. Karanganyar	643	542	101	500	473	27	80	51	29	15	9	6	34	7	27	14	2	12
24	Kab. Wonosobo	612	534	78	460	445	15	103	72	31	16	9	7	30	8	22	3	0	3

25	Kab. Sukoharjo	602	485	117	458	427	31	77	41	36	28	10	18	32	6	26	7	1	6
26	Kab. Purbalingga	595	542	53	466	459	7	77	60	17	16	10	6	34	12	22	2	1	1
27	Kab. Batang	576	516	60	459	453	6	72	51	21	15	7	8	29	4	25	1	1	0
28	Kab. Temanggung	552	464	88	434	409	25	77	42	35	16	6	10	23	6	17	2	1	1
29	Kab. Kudus	542	457	85	441	417	24	50	27	23	17	7	10	29	3	26	5	3	2
30	Kab. Rembang	474	420	54	376	364	12	57	39	18	14	9	5	25	6	19	2	2	0
31	Kota Surakarta	425	203	222	251	158	93	73	27	46	35	8	27	49	9	40	17	1	16
32	Kota Tegal	203	145	58	136	117	19	33	18	15	11	5	6	21	4	17	2	1	1
33	Kota Salatiga	157	94	63	95	77	18	27	10	17	8	3	5	20	3	17	7	1	6
34	Kota Pekalongan	155	97	58	102	71	31	28	17	11	9	4	5	13	4	9	3	1	2
35	Kota Magelang	133	83	50	76	61	15	20	13	7	13	5	8	20	3	17	4	1	3
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.955</b>	<b>20.151</b>	<b>4.804</b>	<b>18.947</b>	<b>17.745</b>	<b>1.202</b>	<b>3.361</b>	<b>1.77</b>	<b>1.591</b>	<b>868</b>	<b>360</b>	<b>508</b>	<b>1.589</b>	<b>237</b>	<b>1.352</b>	<b>190</b>	<b>39</b>	<b>151</b>

Berdasarkan data dari Dapodikdasmen, dan data dari Dinas Sosial Jawa Tengah, dapat dilihat perbandingan antara jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Provinsi Jawa Tengah, dengan Jumlah SLB yang ada di tiap-tiap kota/kabupaten, sehingga dapat dilihat kota/kabupaten mana yang urgensitasnya tinggi, yang akan dijelaskan lebih rinci pada tabel berikut:

**Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah ABK dengan Jumlah SLB**

NO.	WILAYAH	JUMLAH ABK	SLB NEGERI	SLB SWASTA	JUMLAH SLB	JUMLAH ABK/JUMLAH SLB
1	Kab. Cilacap	1730	2	4	6	288.3
2	Kab. Banyumas	1422	0	3	3	474
3	Kab. Purbalingga	974	1	1	2	487
4	Kab. Banjarnegara	693	2	1	3	231
5	Kab. Kebumen	1226	2	4	6	204.6
6	Kab. Purworejo	765	1	2	3	255
7	Kab. Wonosobo	545	0	3	3	181.7
8	Kab. Magelang	1181	0	3	3	393.7
9	Kab. Boyolali	748	1	10	11	68
10	Kab. Klaten	1156	0	14	14	82.6
11	Kab. Sukoharjo	668	1	6	7	95.5
12	Kab. Wonogiri	766	2	6	8	95.8
13	Kab. Karanganyar	547	2	12	14	39
14	Kab. Sragen	728	1	6	7	104
15	Kab. Grobogan	1108	1	3	4	277
16	Kab. Blora	687	1	5	6	114.5
17	Kab. Rembang	536	2	0	2	268
18	Kab. Pati	1037	1	3	4	259.3
19	Kab. Kudus	469	3	2	5	94
20	Kab. Jepara	1051	1	0	1	1051
21	Kab. Demak	927	0	2	2	463.5
22	Kab. Semarang	738	1	8	9	82
23	Kab. Temanggung	717	1	1	2	358.5
24	Kab. Kendal	708	1	5	6	118
25	Kab. Batang	722	1	0	1	722
26	Kab. Pekalongan	962	1	0	1	962
27	Kab. Pemasang	1143	2	0	2	571.5
28	Kab. Tegal	1435	1	1	2	717.5
29	Kab. Brebes	1522	1	1	2	761
30	Kota Magelang	60	1	3	4	
31	Kota Surakarta	274	1	16	17	16
32	Kota Salatiga	104	1	6	7	15
33	Kota Semarang	624	1	17	18	34.7
34	Kota Pekalongan	182	1	2	3	60.7
35	Kota Tegal	213	1	1	2	106.5
	<b>JUMLAH:</b>	<b>28,368</b>	<b>39</b>	<b>51</b>	<b>190</b>	<b>14,184</b>

Berdasarkan data di atas, dan didukung dari data jumlah anak-anak difabel dari Dinas Sosial Jawa Tengah, dapat dipilih 5 kota/kabupaten yang potensial untuk menjadi lokasi pembangunan, yaitu Jepara, Pekalongan, Tegal, Batang, dan Brebes

**Tabel 1.3 Lima Kabupaten yang Potensial sebagai Lokasi**

NO.	WILAYAH	JUMLAH ABK	SLB NEGERI	SLB SWASTA	JUMLAH SLB	JUMLAH ABK/JUMLAH SLB
1	Kab. Jepara	1051	1	0	1	1051
2	Kab. Batang	722	1	0	1	722
3	Kab. Pekalongan	962	1	0	1	962
4	Kab. Tegal	1435	1	1	2	717.5
5	Kab. Brebes	1522	1	1	2	761

Kelima kota/kabupaten ini akan diseleksi kembali berdasarkan indicator-indikator berikut:

**Tabel 1.4 Indikator Pemilikan Kota/Kabupaten**

KRITERIA	BATAS NILAI		
	1	2	3
AKSES ANTAR KOTA	Tidak ada Akses Jalan Tol	Jalan Tol dalam proses pembangunan	Tidak Terdapat Akses Tol
KETERSEDIAAN KENDARAAN UMUM	Tidak Terdapat kendaraan umum	Hanya terdapat kendaraan kecil	Terdapat kendaran besar dan kendaraan kecil
KETERSEDIAAN LAHAN	Tidak ada	Sempit	Luas
URGENSITAS (PERBANDINGAN ANTARA JUMLAH ABK DAN JUMLAH SLB YANG TERSEDIA)	<900	900-1000	>1000

Berdasarkan indicator-indikator di atas, dapat dilakukan penilaian terhadap kelima kabupaten seperti berikut:

**Tabel 1.5 Penilaian Lokasi**

KRITERIA	KABUPATEN				
	JEPARA	PEKALONGAN	TEGAL	BATANG	BREBES
AKSES ANTAR KOTA	2	3	2	3	1
KETERSEDIAAN KENDARAAN UMUM	3	3	2	2	2
KETERSEDIAAN LAHAN	3	1	3	3	3
JUMLAH ABK/JUMLAH SLB	3	1	2	1	1
TOTAL	11	8	9	9	7

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Jepara pun menjadi pilihan. Hal ini didukung oleh data dari Rincian Populasi Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2018 yang diterbitkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara memiliki jumlah anak difabel yang cukup banyak, yakni sekitar 1051 anak, namun menurut Data Sekolah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara hanya memiliki satu SLB saja, yaitu SLB Negeri Jepara.

Sehingga, perlu dibangun SLB dengan status Negeri dan memiliki jenjang SMP, dan SMA, untuk memenuhi kebutuhan dari kabupaten tersebut.

Mengapa harus Negeri? Karena Mengutip data Bidang Pembinaan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, terdapat 39 SLB negeri dan 135 SLB swasta di Jateng. Untuk itu, perlu ada perluasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Ketua Dinas Pendidikan Jateng, satu SLB di tiap kabupaten/kota tidak lagi cukup (Indonesia A. , 2017). Saat ini, rata-rata setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah hanya memiliki satu SLB negeri. Dan satu SLB Negeri di tiap kabupaten/kota dinilai tidaklah cukup.

Jenjang Pendidikan yang dipilih, yaitu SMP, dan SMA, dipilih, karena, masih banyak warga negara difabel yang belum menikmati pendidikan tinggi. Kepala Tim Riset LPEM FEB Universitas Indonesia, Alin Halimatussadiah menjelaskan, estimasi jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 12,5 persen. Yang masuk kategori sedang sebanyak 10,29 persen, dan kategori berat sebanyak 1,87 persen. Dari angka 12 persen penyandang disabilitas, tingkat pendidikan dari 45,74 persen di antaranya tidak pernah atau tidak lulus SD (Susilawati, 2016).

Sebelum melakukan perancangan, ada baiknya jika penulis melakukan studi penelitian di beberapa Sekolah Luar Biasa di Jawa Tengah, untuk membandingkan fasilitas dan pelayanan apakah sudah sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam PERMENDIKNAS No. 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah atas Luar Biasa (SMALB), sehingga pada saat memulai proses perancangan penulis dapat memaksimalkan fasilitas dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka diperoleh rumusan masalah dalam studi kasus ini sebagai berikut:

- Seperti apa desain SLB yang baik, dan sesuai aturan dari PERMENDIKNAS?
- Apa saja fasilitas pelayanan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pengguna gedung SLB di Kabupaten Jepara?
- Bagaimana panduan perancangan SLB di Jepara?

### **1.3. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1.3.1. TUJUAN**

Tujuan dari penyusunan LP3A ini adalah untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan landasan dalam melakukan *Perencanaan dan Perancangan Sekolah Luar Biasa*, berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada baik potensi pengembangan hingga potensi kendala, dengan memberikan suatu alternatif pemecahan secara arsitektural, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang sekolah luar biasa.

#### **1.3.2. SASARAN**

Sasaran dari tersusunnya LP3A ini adalah sebagai salah satu acuan atau langkah dasar dalam proses perencanaan dan perancangan sekolah luar biasa berdasarkan hasil analisa terhadap aspek-aspek panduan perencanaan dan perancangan dan peraturan yang berlaku.

### **1.4. RUANG LINGKUP**

#### **1.4.1. SUBSTANSIAL**

Substansi perancangan ini dititik beratkan pada bidang ilmu arsitektur terutama untuk perencanaan dan perancangan pada sekolah luar biasa di Kabupaten Jepara. Hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung topik utama.

#### **1.4.2. SPASIAL**

Perencanaan dan Perancangan Sekolah Luar Biasa ini, agar tetap memperhatikan standar-standar yang telah ditetapkan dalam PERMENDIKNAS sesuai dengan kebutuhan para pengguna sekolah.

### **1.5. METODE PEMBAHASAN**

Penyusunan LP3A ini menggunakan metode deskriptif, dokumentatif, dan komparatif dimana penyusunan dilakukan dengan pengumpulan data, dan penjabaran terhadap informasi terkait sekolah luar biasa.

Langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan data adalah:

### **1.5.1. KOMPARASI**

Metode komparasi atau preseden ini dilakukan dengan cara membandingkan antara standar yang diberikan pemerintah, hasil studi banding, dan kondisi atau keadaan di lapangan.

### **1.5.2. KAJIAN PUSTAKA**

Metode kajian pustaka dilakukan dengan cara mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan SLB ini.

### **1.5.3. STUDI KASUS**

Studi kasus ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana teknis kegiatan di SLB, apa saja kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa yang tidak dicantumkan dalam peraturan pemerintah, lalu bagaimana cara menangani anak-anak ini, bagaimana perilakunya, dan sebagainya. Hasil studi banding yang sekiranya sesuai dengan kondisi di lokasi pembangunan, diterapkan di SLB yang akan dibangun.

## **1.6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan LP3A ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisikan uraian secara umum mengenai latar belakang pentingnya pembangunan Sekolah Luar Biasa ini, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat yang didapatkan, ruang lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan serta alur pikir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi literatur, mengenai tinjauan anak berkebutuhan khusus; tinjauan sekolah luar biasa; tinjauan asrama; standar dalam perencanaan sarana dan prasarana untuk SMPLB, dan SMALB tipe A, B, C, C1, dan D; serta studi banding.

### **BAB III PENDEKATAN ASPEK**

Berisi Analisa-analisa pendekatan aspek, mulai dari pendekatan fungsional, pendekatan kontekstual, pendekatan aspek kinerja, pendekatan teknis, dan pendekatan arsitektural.

### **BAB IV PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN**

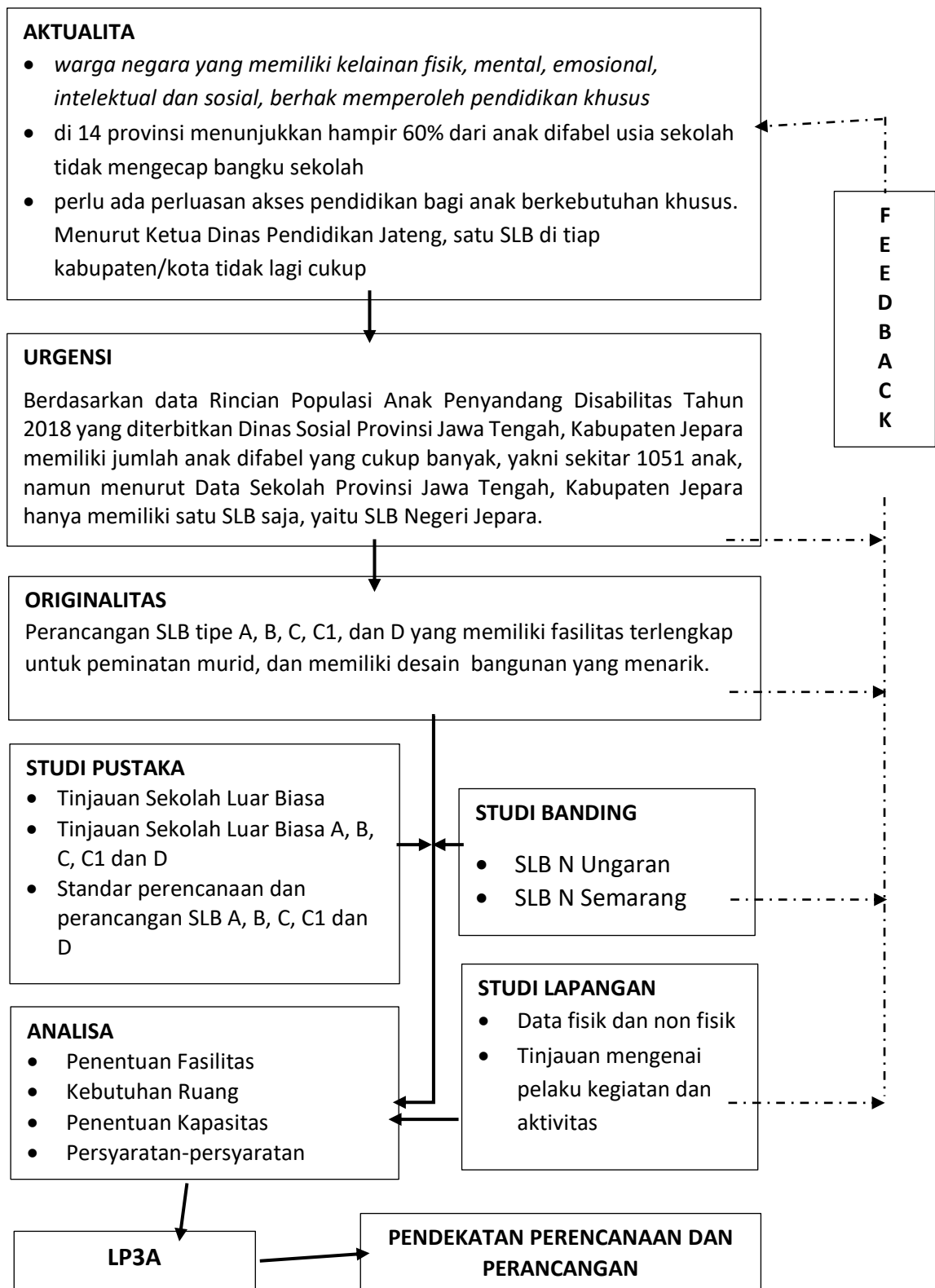
Berisi program-program yang akan digunakan dalam melakukan perencanaan dan perancangan.

### **BAB V KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN**

Berisi hasil dari meninjau segala aspek untuk perencanaan dan perancangan SLB.



## 1.7. ALUR PIKIR



Gambar 1.1 Alur Pikir